

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Fuad Usfa, 2004, *Pengantar Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, UMM Press, Malang.
- A.H. Semendawai, 2005, “*Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 6*”, ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- A.Z. Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainan Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Arief Amarullah, 2006, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Asep N. Mulyana, 2018, “*Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*”, PT. Grasindo, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana; Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Kesatu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Penerbit UNDIP, Semarang.
- Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Chidir Ali, 1987, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Dwidja Priyatna, 2004, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, CV Utomo, Bandung.
- Eddy O.S. Hiariej, 2020, *“Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi”*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Febby Mutiara Nelson, 2020, *“Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Hamzah Hatrick, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Cetakan I*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- M. Marwan dan Jummy P., 2009, *Kamus Hukum; Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT Softmedia, Medan.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 1987, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muh. Hasrul, 2013, *Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Edisi Revisi*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Diah Sulistyani, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility) Edisi Kedua*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Cetakan Ketiga Edisi Revisi*, Kencana, Bandung.
- Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Oce Madril & Hasrul Halili, 2011, *Pengertian Korupsi dalam Hukum Anti Korupsi*, USAID, Bandung.
- Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum, Cetakan Kedua*, Kencana, Jakarta.

- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetakan Kedelapan, Politea, Bogor.
- Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBHI, Jakarta.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif; Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sahetapy, 1982, *Suatu Study Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Salman Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Setiyono, 2002, *Kejahatan Korporasi; Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Averroes Press, Malang.
- Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerojo Wignjodipoero, 1990, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Soetan K. Malikoel Adil, 1955, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, PT. Pembangunan, Jakarta.

- Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1979, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sukidin Basrowi, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, Insan Cendekia, Surabaya.
- Sumadi Suryabrata, 1983, *Proses Belajar Mengajar di Perguruan Tinggi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Grafiti Pers, Jakarta.
- Toetik Rahayuningsih & Indra Wahyuni, *Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Anti Korupsi*.
- Yopie Morya Immanuel Patiro, 2011, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Keni Media, Bandung.
- Yahya Harahap, 1984, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Yan Pamadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, C.V. Aneka, Semarang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 27 November 2017

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 8 Februari 2018.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Januari 2019

D. Jurnal dan Makalah

Budi Suhariyanto, “Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara”, *Jurnal Rechtvinding BPHN*, Jakarta, 2016.

Budi Suhariyanto, “Urgensi Pemidanaan terhadap Pengendali Korporasi yang Tidak Tercantum dalam Kepengurusan”, *Jurnal Yudisial*, Vol 10 No.3, Desember, Tahun 2017.

Dwidja Priyanto, “Reorientasi dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Hukum Pidana”, *Jurnal Syiar Hukum*, Vol 9 No. 3 Tahun 2007.

Eva Syahfitri Nasution, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Mercatoria*, Vol 8 No.2, Desember Tahun 2015.

Fatimah, “Kebijakan Formulasi Asas Vicarious Liability dalam Hukum Pidana di Indonesia”, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol 9, 2014.

Febby Mutiara Nelson, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara: Dapatkah Menggunakan Deferred Prosecution Agreement?”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Kristian, “Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-43 Nomor 4 Oktober-Desember 2013.

Levina Yustitiantingtyas, “Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi dalam Tindakan Pelanggaran HAM di Indonesia”, *Jurnal Novelty*, Vol 7 No.1, Februari 2016.

M. Haryanto, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Individualisasi Pidana”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Edisi Oktober 2012.

Muladi, Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Volume IV Nomor 1, 1998.

Ridwan Rangkuti, “Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997”, *Jurnal Justitia*, Vol 1 No. 3, Agustus Tahun 2014.

Tjandra Sridjaja Pradjonggo, “Alternatif Sanksi Pidana dalam Kejahatan Korporasi”, *Jurnal Yustisia*, Vol 80 Mei-Agustus 2010.

Yudi Krismen, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.1 Tahun 2014.

Yusona Piadi & Rida Ista Sitepu, “Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, 2019.

E. Sumber lain

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Konsep bulan September 2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/01/04/06115311/perjalanan-kasus-pt-nke-korporasi-pertama-yang-divonis-korupsi>

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f2e502cd0e52/pengertian-peradilan-in-absentia/>

https://www.researchgate.net/publication/321182144_Perkembangan_Peraturan_dan_Peradilan_Dalam_Pemberantasan_Tindak_Pidana_Korupsi_di_Indonesia